

Peningkatan Kapasitas Pemilih Pemula Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic

Muhammad Asriadi¹, Masni², Asriati³, Muhammad Qasas Hasyim⁴

¹Pendidikan Teknik Informatika & Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Bosowa

³Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa & Sastra, Universitas Negeri Makassar

⁴Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Masalahnya adalah: 1). Kurangnya pengetahuan masyarakat meliputi dimensi dan ruang lingkup terkait Money Politic dan civic literacy, 2). Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengaplikasian civic literacy, 3). Kurangnya pendampingan terhadap masyarakat dalam membudayakan keterampilan civic literacy. Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pelajar, mahasiswa, pekerja pemula, ataupun mereka yang tidak ada dalam ketiga kategori ini karena tidak bersekolah dan tidak sedang bekerja yang berada pada wilayah Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan pendampingan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 1). Peserta dalam hal ini pelajar, mahasiswa, pekerja pemula, ataupun mereka yang tidak ada dalam ketiga kategori ini karena tidak bersekolah dan tidak sedang bekerja memiliki edukasi terkait perilaku civic literacy dan praktek money politic, 2). Peserta memahami implementasi dari civic literacy terhadap civic attitude, 3). Peserta memiliki kemampuan terkait pencegahan dari berbagai bentuk praktek money politic, 4). Peserta dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan kemampuan civic literacy sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan desa anti money politic. Penguatan kapasitas masyarakat melalui civic literacy memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang berpartisipasi aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu memperkuat demokrasi, mengatasi ketimpangan sosial, membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kehidupan warga negara secara keseluruhan. Individu dapat menjadi warga negara yang terinformasi, terlibat, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Civic Literacy, Money Politic.

Abstract. This PKM activity is carried out in the Batetangnga Village, Binuang Sub-District, Polewali Mandar Regency. The issues are as follows: 1). Lack of community knowledge regarding the dimensions and scope of Money Politics and civic literacy, 2). Insufficient community skills in applying civic literacy, 3). Lack of community support in cultivating civic literacy skills. The target audience for this activity includes students, university students, entry-level workers, or those who do not fall into these categories because they are not in school and not currently employed, all of whom are located in the Batetangnga Village, Binuang Sub-District, Polewali Mandar Regency. The methods used include lectures, Q&A sessions, discussions, demonstrations, and mentoring. The outcomes achieved in the implementation of this activity are as follows: 1). Participants, including students, university students, entry-level workers, or those who do not fall into these categories because they are not in school and not currently employed, have education related to civic literacy behavior and the practice of money politics, 2). Participants understand the implementation of civic literacy on civic attitude, 3). Participants have the ability to prevent various forms of money politics practices, 4). Participants can collaborate in empowering civic literacy skills as a commitment to realizing a money politics-free village. Strengthening community capacity through civic literacy plays a crucial role in building an actively participating, critical, and responsible community. This can help strengthen democracy, address social inequalities, build a fair and sustainable community, and improve the overall quality of citizens' lives. Individuals can become informed, engaged, and responsible citizens in community, nation, and state life.

Keywords: Novice Voters, Civic Literacy, Money Politics.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, warga negara perlu mengetahui dan memahami tentang kewajibannya dalam rangka mendukung dan

mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta sinergi yang komprehensif dalam mewujudkan tujuan negara. Merujuk kepada system demokrasi yang ada saat ini,

warga negara diuntut untuk berperan aktif bukan hanya sebatas ikut serta dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga turut serta dalam hal melaksanakan control terhadap arah kebijakan serta dinamika di lapangan. Salah satu wujud peran warga negara dalam system demokrasi adalah keikutsertaan dalam melakukan pemilihan umum secara langsung. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kekurangan-kekurangan yang sejatinya merusak semangat demokrasi, salah satu dari beberapa peristiwa tersebut adalah masih maraknya praktek money politic(Hudri 2020).

Money politics adalah suatu praktik yang melibatkan penggunaan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan umum atau proses politik lainnya(Cahyadi & Hermawan 2019). Berikut ini adalah beberapa definisi money politics menurut para ahli. Menurut Mochtar Lubis(Lubis 2011), money politics adalah praktik politik yang merusak dan melanggar prinsip demokrasi, di mana uang digunakan untuk memenangkan suara dalam pemilihan. Menurut Syamsuddin Haris(Haris 2014), money politics adalah praktik korupsi dalam bidang politik, di mana uang digunakan untuk mempengaruhi keputusan politik. Sedangkan menurut Mohammad Mahfud MD(Mahfud 2010), money politics adalah bentuk kejahatan pemilu, di mana pemilih dipengaruhi oleh uang atau keuntungan materi lainnya untuk memilih kandidat tertentu. Sedangkan menurut Sri Bintang Pamungkas(Haris 2014), money politics adalah praktik politik yang tidak etis, di mana uang digunakan untuk mempengaruhi proses politik dan memperoleh keuntungan.

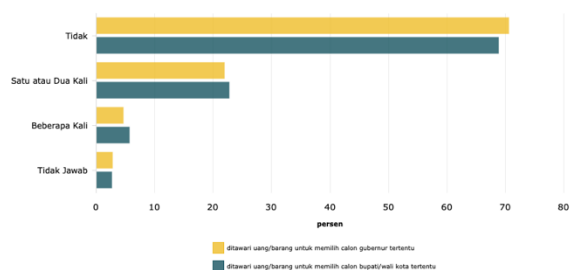
Secara umum, money politics dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran prinsip demokrasi dan dapat mengancam integritas proses politik dan pilihan umum(Nail 2018). Berikut dampak dari Money politics yang merugikan pada demokrasi dan proses politik yang sehat:

- Money politics dapat mempengaruhi pemilihan umum dan merusak integritas pemilu. Dalam konteks ini, calon yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang lebih besar dapat memenangkan pemilihan, bahkan jika mereka tidak memiliki kualifikasi yang memadai(Pahlevi & Amrurrobi 2020).
- Money politics dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan korup. Pemimpin yang dipilih karena praktik money politics cenderung fokus pada memperoleh keuntungan daripada mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat(Pahlevi & Amrurrobi 2020).
- Praktik money politics dapat meningkatkan tingkat korupsi dalam pemerintahan dan memperburuk kualitas pelayanan publik(Muhtadi 2019).
- Dalam sistem politik yang terpengaruh oleh money politics, kepentingan masyarakat seringkali diabaikan. Praktik ini dapat menghasilkan kebijakan publik yang tidak adil dan memperparah kesenjangan sosial(Satria 2019).
- Money politics dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan demokrasi. Ketidakpercayaan ini dapat memperburuk ketegangan politik dan memicu konflik(Satria 2019).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, bahwa praktik money politics dapat merusak demokrasi, menghasilkan pemimpin yang korup dan tidak kompeten, meningkatkan tingkat korupsi, merugikan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan demokrasi. Oleh karena itu, praktik money politics harus dihindari dan diberantas agar proses politik dan pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan.

Fenomena yang selalu marak terjadi di setiap pagelaran pesta demokrasi di Indonesia ini nyatanya belum memperlihatkan angka penurunan yang signifikan dalam 3 edisi pemilu

sebelumnya, terakhir pada pemilu 2020 LSI melakukan survey terkait tawaran money politic yang datang kepada masyarakat yang memiliki hak suara dengan hasil survey sebagai berikut:



Gambar 1. Index Tawaran Money Politic Di Masyarakat 2021

Jika melihat dari survey index tawaran money politic di masyarakat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), survei dilaksanakan via telepon terhadap 2.000 responden dengan metode simple random sampling sepanjang 11-14 Desember 2020. Adapun, tingkat toleransi kesalahan (margin of error) survei ini sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya memperlihatkan 21,9% responden di wilayah Pilkada 2020 yang pernah satu atau dua kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Lalu, 4,7% responden mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Sebanyak 22,7% responden di wilayah Pilkada 2020 mengaku pernah ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/wali kota tertentu. Ada 5,7% responden yang mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/wali kota tertentu.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan masyarakat akan penguatan keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk dilakukan sebagai Langkah awal memutus mata rantai budaya negative dari setiap pagelaran pesta

demokrasi seperti pemilu. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas melalui penguatan civic literacy dalam mewujudkan masyarakat desa anti money politic(Raharjo, Armawi & Soerjo 2017). Seperti di ketahui bahwa keterampilan literasi sangat penting di era saat ini, terutama pada aspek literacy civic untuk membantu masyarakat dalam menggali sumber informasi yang baik dalam peningkatan keterlibatannya dalam proses kewarganegaraan. Secara eksplisit dapat dipahami bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui civic literacy adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik(Armawi & Raharjo 2021). Civic literacy membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, berpikiran kritis, dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka(Darzabi 2020).

Beberapa urgensi penting mengapa masyarakat perlu mengetahui tentang civic literacy antara lain:

- Peningkatan Partisipasi Demokratis, Civic literacy memungkinkan masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial. Dengan pengetahuan tentang civic literacy, masyarakat dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam pembuatan keputusan publik, pemilihan umum, dan kegiatan partisipasi lainnya(Lazere 2017).
- Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia, Civic literacy melibatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi,

kesetaraan, dan keadilan. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka sendiri dan orang lain serta mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (Mirra 2018).

- Mendorong Tanggung Jawab Kewarganegaraan, Civic literacy membantu masyarakat untuk memahami tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Ini mencakup pemahaman tentang partisipasi dalam urusan publik, membayar pajak, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku (Armawi & Raharjo 2021).
- Perlindungan dari Manipulasi dan Pengaruh Negatif, Dalam era informasi yang terus berkembang, civic literacy membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menganalisis informasi dengan bijak. Dengan pengetahuan tentang media, politik, dan proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat mengidentifikasi manipulasi, propaganda, atau pengaruh negatif lainnya yang dapat mempengaruhi pendapat dan tindakan mereka (Helvoort 2019).
- Peningkatan Partisipasi dalam Perubahan Sosial, Civic literacy mempersenjatai masyarakat dengan pemahaman tentang perubahan sosial dan cara-cara untuk mempengaruhinya. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan yang positif, mengatasi ketidaksetaraan, memperjuangkan keadilan, dan memperbaiki kondisi sosial di komunitas mereka (Darzabi 2020).

Melalui pemahaman tentang civic literacy, masyarakat dapat menjadi warga negara

yang terinformasi, terlibat, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Desa Batetangga merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang berada pada wilayah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Desa ini sendiri sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.766 Jiwa. Dari jumlah penduduk yang banyak tersebut dalam suatu wilayah dapat menjadi lumbung suara yang signifikan dalam kegiatan pemilihan umum atau proses demokratis lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempermarak praktek money politik.

Ada beberapa cara yang dapat di tempuh dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui civic literacy, diantaranya sebagai berikut:

- Pendidikan dan pelatihan: Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang meliputi pemahaman dasar tentang sistem politik, hukum, hak asasi manusia, serta cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan non-formal, seperti sekolah, universitas, pelatihan komunitas, dan seminar.
- Informasi dan akses terhadap sumber daya: Masyarakat harus memiliki akses mudah dan terbuka terhadap informasi yang relevan, seperti undang-undang, kebijakan publik, dan mekanisme partisipasi. Peningkatan akses terhadap internet dan teknologi informasi juga penting dalam menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik.
- Kampanye sosialisasi dan kesadaran: Diperlukan kampanye sosialisasi yang aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka,

tanggung jawab sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat dan pemerintahan. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah.

- Pembentukan keterampilan berpikir kritis: Masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, termasuk kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang akurat dan informasi yang dapat dipercaya.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan: Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik melalui mekanisme partisipasi langsung, seperti pemilihan umum, maupun melalui partisipasi dalam dialog dan konsultasi publik.
- Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta: Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal civic literacy memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi civic literacy, sementara masyarakat sipil dan sektor swasta dapat berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan dari civic literacy.

Kondisi yang dialami mitra sebelum dilakukannya kegiatan program PKM diantaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat meliputi dimensi dan ruang lingkup terkait Money Politic dan civic literacy.

- b. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pengaplikasian civic literacy.
- c. Kurangnya pendampingan terhadap masyarakat dalam membudayakan keterampilan civic literacy.

II. METODE YANG DIGUNAKAN

Dengan melihat gejala serta masalah yang ada maka ditawarkan kegiatan berupa pelatihan dan penyajian materi edukasi tentang esensi dari *civic literacy*, melatih terkait perilaku dan keterampilan *civic literacy*, dan pendampingan terkait kolaborasi yang dapat dibangun dalam mendukung pembudayaan kemampuan civic literacy. Dalam pelaksanaannya, disajikan materi pelatihan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat terkhusus kelompok pemilih pemula yang dalam hal ini pemilih pemula yang bisa saja pelajar, mahasiswa, pekerja pemula, ataupun mereka yang tidak ada dalam ketiga kategori ini karena tidak bersekolah dan tidak sedang bekerja yang berada pada wilayah Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Adapun Langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan program PKM ini sebagai berikut:

1. Edukasi Dimensi dan Ruang Lingkup Money Politic dan Civic Literacy..

Kegiatan awal ini dilakukan untuk memberi pemahaman serta menyamakan persepsi terkait hakikat dan ruang lingkup dari money politic dan civic literacy. Pada pelaksanaan tahapan kegiatan, dilakukan pengkajian dan

penyusunan materi terkait guna memberi pemahaman komprehensif kepada peserta workshop. Materi disusun dengan pertimbangan kebaruan referensi yang digunakan yang dikombinasikan dengan media yang sebelumnya telah dianalisis agar efektif dalam penggunaannya selama kegiatan edukasi berlangsung.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah penyajian materi money politic dan civic literacy. Pada tahapan ini materi disajikan secara verbal kepada peserta workshop dengan bantuan LCD Projector dan pengeras suara. Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi dari rangkaian materi kegiatan edukasi terkait dimensi dan ruanglingkup money politic dan civic literacy dengan survei menggunakan instrument angket. Output sebagai hasil dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, materi kegiatan, draf materi kegiatan, dokumentasi pelaksanaan penyajian materi, notulensi kegiatan, serta hasil survei evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Implementasi Civic Literacy.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan demonstrasi langsung sebagai hilirisasi dari pemahaman civic literacy peserta workshop sehingga dapat di internalisasi dengan baik dan diterapkan dalam proses sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahapan kegiatan, dilaksanakan ilustrasi terkait keterampilan yang dicontohkan dalam fragmen sesuai dengan kebiasaan masyarakat agar peserta dapat memahami dan mengerti dengan baik terkait wujud dari perilaku sehari-hari yang termasuk dalam civic attitude. Selain itu dipaparkan pula tentang perbedaan-perbedaan perilaku dalam menghadapi era digital serta kategori-kategori perilaku yang tergolong kedalam penyimpangan. Proses akhir dalam tahapan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi diri terkait demonstrasi dari civic attitude sebagai hilirisasi dari pemahaman civic literacy peserta workshop dengan survei

melalui instrument angket. Output yang dihasilkan dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, dokumentasi pelaksanaan, notulensi diskusi, serta hasil survei keterserapan contoh demonstrasi dari implementasi civic literacy.

3. Kolaborasi Pemberdayaan Kemampuan Civic Literacy

Pada kegiatan akhir ini dipaparkan terkait struktur kolaborasi pemberdayaan kemampuan civic literacy yang dapat dibangun oleh peserta workshop sehingga dapat menjadi kegiatan yang berkesinambungan dan memberi dampak yang besar kepada masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan desa anti money politic terkhusus mempersiapkan masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi di 2024.

Dalam tahapan kegiatan, akan dilaksanakan diskusi yang dilanjutkan dengan koordinasi bersama pemerintah desa guna kesiapan SDM masyarakat Desa Batetangnga menyambut pesta demokrasi di tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya peserta workshop diajak untuk menyatukan komitmen untuk menyatakan diri sebagai warga yang menolak aksi-aksi yang mungkin saja terjadi terkait money politic pada kegiatan pemilu nantinya. Pada prosesnya dilaksanakan pengumpulan tanda tangan sebagai wujud persetujuan warga dalam mendukung desa untuk bertransformasi sebagai wilayah yang menolak atau anti terhadap praktik-praktik money politik.

Tahapan akhir dalam kegiatan ini adalah melakukan evaluasi diri terkait kolaborasi pemberdayaan kemampuan civic literacy dengan survei menggunakan instrument angket. Output yang dihasilkan dari tahapan-tahapan pada kegiatan ini adalah, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, spanduk dan kain tanda tangan, serta hasil survei terkait pelaksanaan kegiatan.

IV. KESIMPULAN

Dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan, menunjukkan hasil yang positif sehingga dapat memberi dampak yang baik dalam aktivitas sosial yang dijalannya terutama terkait pencegahan perilaku money politic demi mewujudkan komitmen integritas sebagai desa anti money politic. Adapun hasil dari setiap sesi dari kegiatan yang dilakukan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Peserta dalam hal ini pelajar, mahasiswa, pekerja pemula, ataupun mereka yang tidak ada dalam ketiga kategori ini karena tidak bersekolah dan tidak sedang bekerja memiliki edukasi terkait perilaku civic literacy dan praktek money politic,
- b) Peserta memahami implementasi dari civic literacy terhadap civic attitude,
- c) Peserta memiliki kemampuan terkait pencegahan dari berbagai bentuk praktek money politic,
- d) Peserta dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan kemampuan civic literacy sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan desa anti money politic.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah dalam pelaksanaan program kegiatan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Rektor Universitas Negeri Makassar atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada mitra PKM yakni Masyarakat Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberi dukungan serta kerja sama yang baik pada kegiatan PKM hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2018). The effects of “phubbing” on social interaction. *Journal of Applied Social Psychology*, 48(6), 304-316.
2. David, M. E., & Roberts, J. A. (2017). Phubbed and alone: Phone snubbing, social exclusion, and attachment to social media. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2(2), 155-163.
3. Karadağ, E., Tosuntaş, Ş. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Şahin, B. M., ... & Babadağ, B. (2015). Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. *Journal of behavioral addictions*, 4(2), 60-74.
4. Nazir, T., & Pişkin, M. (2016). Phubbing: A technological invasion which connected the world but disconnected humans. *The International Journal of Indian Psychology*, 3(4), 2348-5396.
5. Normawati et. al. (2018). Pengaruh Kampanye Lets Talk Disconnect To Connect” Terhadap Sikap Anti Phubbing (Survey Pada Followers Official Account Line Starbucks Indonesia)”. *Jurnal Komunikasi*, 3, 160.
6. Ugur, N. G., & Koc, T. (2015). Time for digital detox: Misuse of mobile technology and phubbing. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 195, 1022-1031.